

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dekade terakhir ini dunia pendidikan nasional sedang mengalami berbagai perubahan cukup mendasar, berkaitan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, program dan kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan pada gilirannya dapat memecahkan permasalahan pendidikan, baik masalah konvensional maupun kontemporer. Di samping itu, perubahan-perubahan tersebut diharapkan pula agar mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era kesejagatan dalam persaingan global, terutama dalam bidang pendidikan.¹

Pendidikan memiliki fungsi dan peran yang tinggi bagi proses kehidupan manusia. Melalui pendidikan potensi-potensi yang dimiliki manusia dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.² Pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan kepribadian setiap individu menuju tingkat kedewasaan.

Usaha peningkatan sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan terkait dengan hasil sumber daya manusia yang berkualitas. Tumpuan pendidikan berkualitas adalah lembaga pendidikan yang tidak saja membekali kemampuan kognitif, juga membekali kemampuan afektif dan psikomotorik.³

¹ Kompri, 2014, *Program Sekolah: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, h. 6

² Jalaludin dan Abdulla Idi, 2007, *Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, h. 155

³ Isjoni, 2008, *Memajukan Bangsa dengan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 3

Pendidikan memerlukan beberapa perangkat (*software* dan *hardware*) agar mampu menerjemahkan fungsi tersebut secara realitas sosial. Proses transfer ilmu, nilai, dan kesadaran adalah ujung yang akan dituju dalam pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan adalah proses yang berlangsung dinamis. Jika yang terjadi adalah stagnasi maupun kejumudan maka prosesnya pun tidak akan komprehensif. Bahkan berdampak pada merosotnya kualitas kehidupan, yang akan menyeret pada kolonisasi baik fisik, mental maupun ideologi.⁴

Kualitas pendidikan harus diiringi dengan kualitas pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pimpinan pendidikan harus dapat mengelola pendidikan dengan baik, dengan harapan lembaga pendidikan yang dipimpinnya menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan bisa menghasilkan output yang berkualitas, tidak terkecuali pengelolaan terhadap pendidikan inklusif.

Pendidikan Inklusif lahir berawal dari meningkatnya kesadaran bahwa semua warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil, dan pendidikan yang bermutu dengan tanpa diskriminatif. Menurut UU Sisdiknas tahun 2003, pasal 15 pemerintah telah mengesahkan pendidikan khusus, yaitu pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.

Di Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segresi di

⁴ Abdurrahman, 2007, *Meaningful Learning Reinvensi Kebermaknaan Pembelajaran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 24

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di Ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SDLB dan SLB yang jauh dari tempat tinggalnya.⁵

Di sisi lain sekolah umum juga belum memiliki kesiapan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus karena tidak mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Berbagai hambatan dalam implementasi dan program pendidikan inklusif muncul dalam sekolah umum, antara lain kesiapan pendidikan dan tenaga kependidikan, kesediaan sarana parasarana serta faktor budaya sekolah menjadi beberapa penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal ini menjadi penyebab pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Pendidikan kabupaten telah menetapkan sekolah-sekolah tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga diharapkan pada saatnya nanti semua sekolah di Indonesia wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Muhammadiyah melalui bidang pendidikan telah memberikan sumbangan yang berharga bagi bangsa ini, yaitu telah melahirkan generasi bangsa yang cerdas iman, dan alam pikirannya serta mampu menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan di berbagai ranah. Dalam masyarakat, Muhammadiyah dikenal dan identik dengan gerakan pendidikannya. Gerakan pendidikan yang berada di lingkungan Muhammadiyah berada dalam satu bidang

⁵ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, hal. v

amal usaha yaitu bidang pendidikan yang mencakup mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Tujuan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah adalah “membentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah *Subhanahu wata’ala*”. Dari tujuan ini maka dikembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menjadi amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.⁶

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah pada tingkatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, telah menumbuhkan sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan sampai ke jenjang Madaratsah-madaratsah. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, PDM Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah memiliki 25 sekolah, yang tersebar dalam 17 Kecamatan.

Seiring dengan perkembangannya dilaksanakannya pendidikan inklusif yang wajib diadakan minimal 1 di setiap kecamatan, maka sejak tahun 2010, beberapa sekolah Muhammadiyah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Sekolah tersebut adalah SMP Muhammadiyah 1 Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan. Keempat sekolah tersebut pada tahun 2015 telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten

⁶ Tasman Hamami, dkk, 2015, *Kumpulan Peraturan/Ketentuan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Derah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Majelis Dikdasmen PWM Yogyakarta, h. 327

Sleman, sebagai sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Hal yang menggembirakan, seiring dengan berkembangnya pendidikan inklusif dan faktor kebutuhan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah reguler, maka pada tahun ajaran 2017/2018, sekolah Muhammadiyah khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat tambahan oleh Dinas pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusif, seperti SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 2 Depok, SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, dan SMP Muhammadiyah 1 Ngeplak.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah Muhammadiyah, apabila ditinjau dari berkembangnya pendidikan inklusif, menunjukkan adanya bentuk perhatian dari pemerintah dan bentuk kepercayaan orang tua yang diberikan kepada sekolah Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebab tidak semua sekolah siap untuk menerima penunjukan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu, masyarakat khususnya yang dekat sekolah semakin percaya kepada sekolah Muhammadiyah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah, terlebih bagi orang tua yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah Muhammadiyah menjadi pilihan bagi masyarakat di bidang pendidikan inklusif.

Apabila ditinjau dari perkembangan jumlah peserta didik, SMP Muhammadiyah 1 Sleman, pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah pesertanya hanya 153 peserta didik, tetapi di tahun 2017/2018 jumlah peserta didik sudah mencapai 304. Begitu juga dengan SMP Muhammadiyah 1 dengan 15 rombongan belajar dan SMP Muhammadiyah 2 Godean dengan jumlah 12 rombongan belajar, senantiasa mengalami perkembangan jumlah peserta didik. Terlebih bagi SMP Muhammadiyah 1 Moyudan, yang berlokasi di paling barat Selatan di

Kabupaten Sleman, dengan keberadaannya di dusun, di pinggir persawahan, tetap diminati masyarakat, terbukti dengan peningkatan jumlah peserta didik, 87 peserta didik di tahun 2011/2012, pada tahun ajaran 2017/2018 sudah mencapai 167 peserta didik.

Mengelola pendidikan inklusif tidaklah mudah, mengingat bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang di dalamnya berlangsung secara bersama-sama antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu terdapat persiapan khusus pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola peserta didik berkebutuhan khusus. Sampai sejauh mana perkembangan pelaksanaan pendidikan inklusif di empat sekolah tersebut, memang sangat menarik untuk diteliti. Apakah dalam pelaksanaannya benar-benar telah menggunakan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, ataupun kurikulumnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mudah untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas? Jika melihat dari perkembangan jumlah peserta didik empat sekolah tersebut senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya jumlah peserta didik, apakah sudah terjadi pula peningkatan di sisi akademik dan non akademik? Bagaimana pula penguatan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah terlaksana bagi anak berkebutuhan khusus pada empat sekolah tersebut?

Melihat fenomena ini, tentunya harus dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, agar dapat diukur sampai sejauhmana program pengelolaan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di empat sekolah tersebut, dengan harapan dari tahun ke tahun, pola pendidikan inklusif di empat sekolah tersebut dan di beberapa sekolah Muhammadiyah lainnya menunjukkan kemajuan sekolah, khususnya bagi pengembangan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kegiatan evaluasi terhadap program pendidikan inklusif di empat sekolah tersebut dapat dilaksanakan. Harapannya agar sekolah Muhammadiyah dalam hal ini SMP yang sudah diberikan untuk melaksanakan pendidikan inklusif secara formal, semakin lebih baik lagi, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, serta menghasilkan kompetensi lulusan peserta didik inklusif yang berprestasi sesuai dengan kondisinya, serta tetap menjadi sekolah yang berbasis dakwah melahirkan kader persyarikatan yang bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakan hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat Sekolah Pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pendidikan inklusif di empat Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat Sekolah Pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

Kegunaan penelitian:

1. Secara Praktis :
 - a. Bagi Orang tua anak berkebutuhan khusus :

Dapat menumbuhkan opini positif terhadap keberadaan sekolah inklusi.
 - b. Bagi Sekolah/instansi :

Dapat melakukan dan program tindak lanjut dalam peningkatan program pendidikan inklusif

c. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah :

Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, lebih memperhatikan kembali sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya SMP Muhammadiyah yang mendapat ijin melaksanakan pendidikan inklusif, sehingga dapat memberikan pendampingan dan penguatan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif.

2. Secara Teoritis :

Bagi para peneliti, termotivasi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya di bidang pendidikan inklusif, sehingga dapat memunculkan regulasi pendidikan inklusif yang lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan bermanfaat bagi pengguna pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pendidikan evaluasi pendidikan inklusif pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Tesis dengan judul “Studi Evaluasi Program Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak”, oleh Gusti Nono Haryono, pada tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai efektifitas program pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Hasil temuan komponen proses menunjukkan kegiatan

perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran untuk setiap aspek dinilai masuk dalam katagori baik dan cukup baik. Hasil temuan komponen produk menunjukkan produk perkembangan aspek akademik ABK berdasarkan nilai UAS dan UN dinilai cukup menggembirakan.⁷

2. Jurnal Inklusi yang berjudul “Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif bagi Peserta Didik *Difabel* Netral, oleh Hendro Sugiyono Wibowo pada tahun 2015, penelitian dilaksanakan di Cibinong Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana fenomena-fenomena yang diungkap dijelaskan dengan narasi deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan data penulis menggali dari tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan difabilitas.⁸
3. Journal of Disability Studies dengan judul “ Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)): Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, oleh Mayasari, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kurikulum 2013 pada ABK di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis⁹
4. Jurnal Program Pendidikan yang berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya, oleh Dwi Sartica dan Bambang Ismanto, pada tahun 2016 di Kota Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan metode CIPP, dengan

⁷ Gusti Nono Haryono, 2015, *Studi Evaluasi Program Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak*, Pontianak, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak

⁸ Hendro Sugiyono Wibowo, 2015, *Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif bagi Peserta Didik Difabel Netral*, Cibinong, Jawa Barat, Jurnal Inklusif vol.2.no.1.

⁹ Mayasari, 2016, Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 1-18. DOI: 10.14421/ijds.030101 *Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK): Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah*

menggunakan pendekatan analitik kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusif di tiga sekolah meliputi SDN 6 Bukit Tunggal, SMPN 3 Palangkaraya, SMAN 4 Palangkaraya.¹⁰

5. Jurnal Program Pendidikan yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusif di Sekolah Dasar”, oleh Rika Widyawati . Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cukilan 01 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode CIPP meliputi evaluasi *Contex, Input, Process, Output*, kemudian dianalisis secara kualitatif dan diskripsikan utk diambil kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Cukilan 01 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil observasi, bahwa sebelumnya belum pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis di empat sekolah tersebut. Jika pada beberapa penelitian di atas fokus pada satu sekolah, seperti penelitian Mayasari hanya di SD Muhammadiyah Sapen, Rika Widyawati penelitian di SDN Cikulan. Sementara penelitian lainnya, meneliti di beberapa sekolah dasar dan penelitian antar jenjang (SD, SMP, SMA), maka pada penelitian ini mengambil penelitian untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) saja khususnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

¹⁰ Dwi Santica dan Ismanto, *Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya*, Salatiga: Jurnal Program Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana Volume: 3, No. 1, Januari-Juni 2016 jurnalkelola

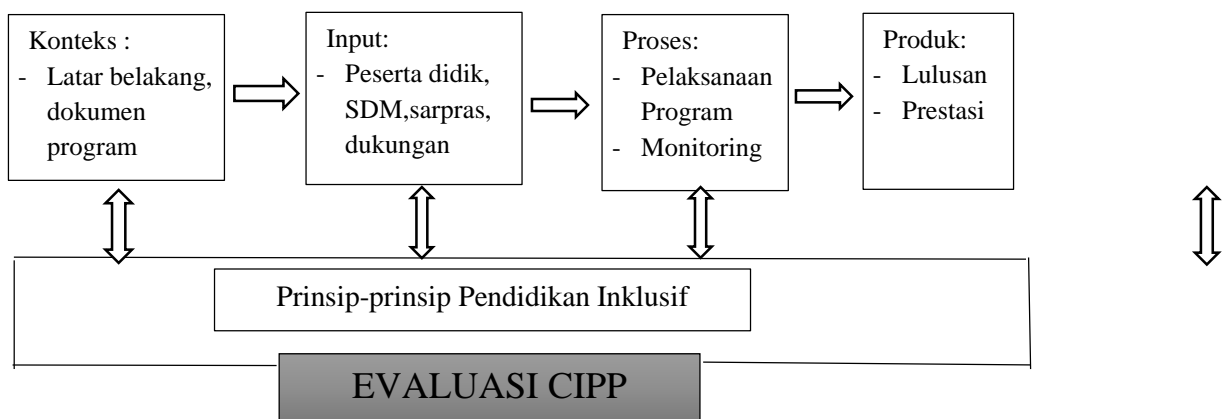
¹¹ Rika Widyawati, 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusif di Sekolah Dasar*, Salatiga: Jurnal Kelola Program Pendidikan, Program Magister Program Universitas Satya Wacana

E. Kerangka Berfikir

Evaluasi program ini dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan program pendidikan inklusif di empat sekolah Muhammadiyah di Sleman untuk jenjang sekolah menengah pertama. Dalam evaluasi ini menggunakan model *Context, Input, Process and Product* (CIPP). Dalam model evaluasi CIPP diperlukan empat data utama yaitu konteks, input, proses dan produk. Keempat data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing data yang terkumpul akan diolah untuk dilakukan penilaian.

Data dikumpulkan dan diperoleh dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara bersifat *unstructured* dimana terfokus pada masalah tertentu dan bersifat bebas. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah dengan mencakup semua komponen model CIPP (*context, input, process, product*). Sementara wawancara terhadap guru penanggungjawab program inklusif melalui 3 komponen model CIPP (*input, process, product*).

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian Evaluasi Pendidikan Inklusif

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah :

1. Bagian Awal

Terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, nota dinas, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran.

2. Bagian Isi

a. Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

b. Bab II : Landasan Teori

Pada bab landasan teori memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan topik, objek ataupun subjek penelitian, yang merupakan penyiapan "alat-alat analisis" yang akan digunakan dalam memahami, menjawab, memecahkan atau menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian.

d. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini mencakup hasil dan pembahasan yang merupakan satu rangkaian, terdiri dari profil sekolah, hasil analisis data serta pemaparan dalam bentuk daftar (tabel), gambar atau bentuk lain. Sedangkan pembahasan berupa keterangan terhadap data/hasil penelitian dengan cara mengaitkan antara satu data dengan data lainnya.

e. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Adapun saran berisi usulan-usulan (rekomendasi) yang diajukan berdasarkan hasil dan pembahsan.

3. Bagian Akhir

- a. Daftar Pustaka Rujukan
- b. Lampiran
- c. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*)